

**PEMBERDAYAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA BALI
TERHADAP PENYULUH BAHASA BALI**

Ida Ayu Iran Adhiti^{1*}, Gede Sidi Artajaya², Ida Ayu Pristina Pidada³
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia¹, Universitas PGRI Mahadewa
Indonesia², Universitas Bali Dwipa³
dayuiran@gmail.com

ABSTRACT

In relation of development, preservation, and developments of Balinese language, literature, and script, the Bali Provincial Culture Services appoints Balinese language instructor contract workers who have competence in the fields of Balinese language, literature, and script. It is intended that people who live in Pakraman village able to understand Balinese languages, literatures, and scripts are properly and correctly. As extension workers, we need personnel who are in accordance with the fields of languages, literatures, and Balinese scripts. Extension workers assigned to Badung Regency are used as samples for languages, literatures, and literacy empowerment because extension workers face complex situations and conditions. The academic team as resource persons provided an in-depth understanding of Balinese language, literatures, and scripts according to their competence as extension workers.

Keywords: Empowerment, Balinese Language

ABSTRAK

Terkait dengan pembinaan, pengembangan, serta pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali maka Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengangkat tenaga kontrak penyuluh bahasa Bali yang memiliki kompetensi bidang ilmu bahasa, sastra, dan aksara Bali. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang berdomisili di desa pakraman mampu memahami tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali dengan baik dan benar. Sebagai tenaga penyuluh diperlukan tenaga yang sesuai dengan bidang bahasa, sastra, dan aksara Bali. Tenaga penyuluh yang bertugas di Kabupaten Badung digunakan sebagai sampel untuk pemberdayaan bahasa, sastra, dan aksara karena penyuluh menghadapi situasi dan kondisi yang kompleks. Tim akademisi sebagai narasumber memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahasa, sastra, dan aksara Bali sesuai dengan kompetensi mereka sebagai tenaga penyuluh.

Kata kunci: Pemberdayaan, Bahasa Bali

PENDAHULUAN

Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki sistem serta kaidah-kaidah yang ada (Chaer 2014:4; Verhaar, 1984:3; Sudaryanto, 1986:24). Di

samping itu, bahasa juga merupakan alat kebudayaan baik di bidang sastra, politik, ilmu pengetahuan, maupun pembangunan (Samsuri, 1985:24; Greenberg, 1963:61; Tarigan, 1986:2).

Oleh karena itu bahasa perlu dibina, dilestarikan, dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat pendukungnya (Bagus.ed, 1975:117)

Bahasa daerah, seperti bahasa Bali merupakan bahasa yang khas, karena memiliki aksara tersendiri. Sebagai sarana komunikasi mulai terdesak oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Menurut fungsi dan kedudukannya bahasa daerah (bahasa Bali) merupakan lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa Bali sesungguhnya bagian dari kebudayaan Bali yang tetap hidup dan berkembang di Bali (Sulaga, 1996:32). Tergerusnya bahasa daerah (Bali) tersebut ada beberapa upaya penyelamatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, seperti mewajibkan hari berbahasa Bali, lomba *nyastra*, kongres bahasa Bali dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mengkaji tentang pemberdayaan bahasa, sastra, dan aksara Bali terhadap penyuluh bahasa Bali. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap penyuluh bahasa Bali agar dapat memberdayakan bahasa, sastra, dan aksara Bali agar mampu disosialisasikan

kepada masyarakat di desa pakraman masing-masing.

Permendagri nomor: 40/2007 pada Bab II pasal 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata. Kepala daerah memberikan fasilitasi untuk pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya, pada Perda nomor: 3/1992 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta membentuk Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur yang dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Kewajiban pembinaan bahasa Bali seharusnya dilakukan oleh *stake holder* yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembinaan bahasa Bali dikuatkan oleh Undang-Undang dan berbagai peraturan yakni:

1. UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara
Dan Lagu Kebangsaan

2. Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
3. Perda No 3 Tahun 1992 Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali
4. Surat Keputusan Gubernur Bali No 179 tahun 1995 dan Peraturan Gubernur Bali Tahun 2013.

Bertolak dari Permendagri dan Perda tersebut maka Kepala Daerah perlu menyikapi tentang pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengangkat tenaga penyuluh bahasa Bali untuk memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan bahasa Bali terutama di Kabupaten Badung. Hal ini tentu bertujuan agar seluruh masyarakat yang berdomisili di desa pekraman mampu memahami tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali dengan baik dan benar. Di samping itu, diharapkan pula penyuluh mampu memberikan keterampilan tentang bahasa Bali baik kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis.

Pemberdayaan bahasa, sastra, dan aksara Bali terhadap penyuluh bahasa Bali yang bertugas di Kabupaten Badung

dipilih sebagai sampel penelitian mengingat keberadaan masyarakat Badung sangat kompleks. Masyarakat pendukung bahasa Bali di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dan budaya. Di samping itu penggunaan bahasa Bali di Kabupaten Badung memiliki dialek yang tidak baku, kalau dikaji dari kaidah-kaidah bahasa dibandingkan dengan kabupaten lain (Ananda, 1986; Depdikbud, 1995; Gautama, 2005; Panitia Penyusun Kamus, 1978).

METODE PENELITIAN

Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan metode *observasi* di lokasi penelitian. Metode *observasi* digunakan untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, agar memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diamati (Muhadjir, 1996:180; Mahsun, 2007: 92). Metode wawancara dilakukan dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan serta tanya jawab dan tatap muka dengan informan (Danandjaya, 1994:102; Ayatrohaedi, 1979: 33). Metode ini dapat dijabarkan menjadi metode simak dan metode cakap (band dengan Sudaryanto, 1988: 2-9; Mahsun, 2007: 92-96). Bungin

(2008) menyebut dengan istilah *observasi* untuk metode simak dan wawancara untuk istilah metode cakap (cakap semuka). Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa penyuluh yang bertugas di Kabupaten Badung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Samarin, 1988: 55-70; Suryati, 2012: 61). Sumber data primer diperoleh dari sejumlah penyuluh bahasa Bali yang bertugas di Kabupaten Badung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari laporan penyuluh dalam bentuk laporan yang disampaikan setiap bulan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Di samping itu dilengkapi dengan kajian yang ditulis dari beberapa pakar yang mengkaji tentang pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa Bali.

Kajian data disajikan deskriptif analitis (Sudaryanto, 1986:13-30; Djajasudarma, 1993:58; dan Mahsun, 2007:120-122), yakni mendeskripsikan materi yang diberikan kepada tim penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Badung. Penyajian materi tersebut berupa pembekalan terhadap tim penyuluh sehingga mampu memberdayakan bahasa, sastra, dan

aksara Bali yang disosialisasikan kepada masyarakat di tempat mereka bertugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada kajian ini adalah tentang pemberdayaan bahasa Bali terhadap penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Badung, dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan tentang pemberdayaan bahasa Bali, terutama di Kabupaten Badung. Pemberdayaan bahasa Bali terhadap penyuluh bahasa Bali dipilih Kabupaten Badung sebagai sampel penelitian mengingat keberadaan masyarakat Badung sangat kompleks. Masyarakat pendukung bahasa Bali di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dan budaya. Materi tentang pemberdayaan bahasa Bali diberikan oleh tenaga akademis sesuai dengan bidang ilmunya. Selanjutnya, para tenaga penyuluh diharapkan agar mampu membina masyarakat di tempat mereka bertugas. Dinas Pendidikan Provinsi Bali bertugas untuk menempatkan tenaga penyuluh di beberapa desa di Kabupaten Badung. Sedangkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung bertugas memantau dan mengevaluasi tenaga penyuluh

tersebut serta dibina oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun masing-masing.

Pembinaan perberdayaan terhadap penyuluh bahasa Bali bertujuan menanamkan kepada masyarakat terhadap keberadaan bahasa Bali agar: (1) Memperkuat jati diri masyarakat Bali; (2) Mencegah kepunahan bahasa, aksara, dan sastra Bali; (3) Sebagai upaya untuk membina dan mengembangkan bahasa, aksara, dan sastra Bali; (4) Memfasilitasi masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Bali; dan (5) Memotivasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya tersebut. Selanjutnya, konteks bahasa dan berbahasa ibu sesungguhnya bermakna (1) Pelestarian Bahasa Ibu dan (2) Sebagai Sumber Pembentukan Karakter. Penggunaan bahasa Bali dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Banyak kalangan khawatir karena generasi muda lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa asing jika dibandingkan dengan bahasa Bali. Alasannya, karena bahasa Bali tidak dapat digunakan untuk mencari uang. Di samping itu eksistensi bahasa Bali menjadi keluhan masyarakat mengenai kerumitan pemakaiannya, karena adanya variasi secara geografis dan stratifikasi

sosial (*anggah-ungguhing basa*). Bahasa Bali merupakan penyangga budaya, adat, dan agama Hindu. Untuk itu masyarakat perlu dibina dan diberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami betapa pentingnya pelestarian bahasa Bali (Suryati, dkk, 2016:51-52). Penggunaan bahasa Bali yang baik dan benar sesuai *anggah-ungguhing basa* difokuskan adanya pembagian bahasa Bali sesuai dengan tingkat-tingkatan berbahasa. (Bagus, 1975; Narayana, 1979).

Penggunaan bahasa Bali dapat dikatakan mulai tergerus oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan mempelajari bahasa asing. Di samping itu eksistensi bahasa Bali menjadi keluhan masyarakat mengenai kerumitan pemakaiannya, terutama terkait dengan stratifikasi sosial (*anggah-ungguhing basa*). Penggunaan bahasa Bali yang baik dan benar diharapkan sesuai dengan *anggah-ungguhing basa*. Kabupaten Badung perlu mendapat pembinaan pemberdayaan bahasa Bali yang lebih intensif, mengingat keberadaan penduduk yang sangat kompleks.

Bahasa daerah, seperti bahasa Bali merupakan bahasa yang khas karena memiliki aksara tersendiri. Sebagai sarana komunikasi mulai terdesak oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Menurut fungsi dan kedudukannya bahasa daerah (bahasa Bali) merupakan lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu bahasa Bali sesungguhnya bagian dari kebudayaan Bali yang tetap hidup dan berkembang di Bali (Sulaga, 1996: 32). Tergerusnya bahasa daerah (Bali) tersebut ada beberapa upaya penyelamatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti mewajibkan hari berbahasa Bali, lomba *nyastra*, kongres bahasa Bali dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut maka peneliti melakukan pembinaan terhadap penyuluh bahasa Bali agar dapat memberdayakan bahasa, sastra, dan aksara Bali yang disosialisasikan kepada masyarakat di desa pakraman masing-masing.

Permendagri No 40/2007 pada Bab II pasal 2 dinyatakan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk

kosakata. Kepala daerah memberikan fasilitasi untuk pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya Perda No 3/1992 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta membentuk Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan sastra Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Bertolak dari Permendagri dan Perda tersebut maka Kepala Daerah perlu menyikapi tentang pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengangkat tenaga penyuluh bahasa Bali untuk memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan bahasa Bali terutama di Kabupaten Badung. Hal ini tentu bertujuan seluruh masyarakat yang berdomisili di desa pakraman mampu memahami tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali dengan baik dan benar.

Sebagai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengangkat tenaga penyuluh bahasa

Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyuluh Bahasa Bali. Penyuluh Bahasa Bali diharapkan mampu memberdayakan bahasa Bali terhadap desa Pekraman yang dibina dalam melestarikan, membina, dan mengembangkan bahasa Bali terutama di Kabupaten Badung. Pelestarian yang dimaksud adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Bali melalui penelitian, pembinaan, dan pengajaran. Pengembangan yang dimaksud adalah upaya memodernkan bahasa Bali melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa. Sedangkan pembinaan yang dimaksud adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Bali di semua jenis dan jenjang pendidikan, pemasyarakatan bahasa, keteladanan, dan sikap positif.

Tenaga penyuluh bahasa Bali sebagai tenaga kontrak diangkat oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berkolaborasi dengan tenaga akademis dari beberapa Perguruan Tinggi serta dikawal oleh beberapa staf ahli yang berkompeten di bidang bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dinas Kebudayaan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pembinaan tersebut.

Berdasarkan solusi yang ditawarkan pada uraian di atas yakni Dinas Kebudayaan Propinsi Bali mengangkat tenaga kontrak sebagai penyuluh bahasa, sastra, dan aksara Bali di seluruh kabupaten. Peneliti memilih tempat penelitian di Kabupaten Badung mengingat situasi dan kondisi yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain. Pembekalan terhadap penyuluh bahasa Bali yang bertugas di Kabupaten Badung diharapkan agar mampu meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahasa Bali berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Bali.

Berbahasa Bali yang baik dan benar, pemahaman tentang sastra dan aksara Bali merupakan target pemberdayaan bagi penyuluh bahasa Bali. Materi yang diberikan pada pemberdayaan bahasa adalah *angguh-ungguhing* atau tingkat-tingkatan berbahasa terutama pada kegiatan berbicara, mengingat bahasa Bali adalah bahasa yang dipelajari, dibina, dikembangkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Bali. Pembinaan tentang pemahaman kosakata merupakan materi yang disajikan terutama menyangkut tentang *angguh-ungguhing kruna* bahasa Bali. *Kruna*

yang dimaksudkan adalah 1) *Kruna Alus*, terdiri dari (1) *Kruna Alus Mider*; (2) *Kruna Alus Madia*; (3) *Kruna Alus Singgih*; dan *Kruna Alus Sor*. 2) *Kruna Nenten Alus*, terdiri dari (1) *Kruna Mider*; (2) *Kruna Andap*; (3) dan *Kruna Kasar*. Selanjutnya materi tentang sastra Bali, yakni sastra yang diciptakan menggunakan bahasa Bali. Karya sastra tersebut mengandung unsur estetik. Bentuk karya sastra terdiri atas Sastra Bali Purwa, yakni: *Parwa*, *Babad*, *Satua*, *Paribasa*, *Kakawin*, *Kidung*, *Geguritan*, dan *Gegendingan*, dan Sastra Bali Anyar, yakni: Puisi, Cerpen, Novel, dan Drama. Materi tentang aksara ditekankan pada :1) Aksara Bali, yakni *Aksara Suara* dan *Aksara Wianjana*; 2) *Pengangge Aksara*; dan 3) *Wangun Gantungan miwah Gempelan*. Pasang Aksara Bali dipaparkan tentang *Nyurat Kruna*, yakni 1) *Kruna Lingga*; 2) *Kruna Tiron*, dan 3) *Kruna Dwipurwa*.

SIMPULAN

Permendagri No 40/2007 pada Bab II pasal 2 dinyatakan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata. Kepala daerah memberikan

fasilitasi untuk pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya Perda No 3/1992 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta membentuk Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan sastra Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Pengangkatan tenaga penyuluh bahasa Bali merupakan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tenaga akademisi sebagai narasumber bertugas memberikan pembinaan tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali terhadap tenaga penyuluh.

Tenaga penyuluh bahasa Bali sebagai tenaga kontrak diangkat oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berkolaborasi dengan tenaga akademis dari beberapa Perguruan Tinggi serta didampingi oleh beberapa staf ahli yang berkompeten di bidang bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dinas Kebudayaan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan.

Materi yang disajikan kepada penyuluh menyangkut pemahaman dan pendalaman terhadap bahasa, sastra, dan aksara Bali. Tim akademisi sebagai narasumber pada kegiatan pembinaan terhadap penyuluh bahasa Bali. Dengan demikian pembinaan tersebut diharapkan penyuluh mampu memberdayakan materi tentang bahasa, sastra, dan aksara Bali di desa tempat mereka bertugas.

SARAN

Pemerintah Daerah Propinsi Bali diharapkan secara rutin mengangkat penyuluh bahasa Bali sebagai tenaga kontrak sesuai anggaran yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk pelestarian bahasa dan budaya Bali sehingga masyarakat bangga terhadap keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Bali serta budaya Bali yang tersohor di manca negara.

Tim akademisi secara profesional sebagai narasumber memberikan pembinaan terhadap penyuluh agar mampu mensosialisasi dan mengaplikasikan bidang ilmunya di masyarakat tempat mereka bertugas. Penyuluh diarahkan oleh tim akademisi untuk mampu mengikuti program desa di tempat mereka bertugas. Di samping itu, tenaga penyuluh mengamati situasi dan

kondisi desa pakraman tempat mereka bertugas. Setelah mengetahui keadaan desa yang dibina, maka penyuluh membuat program sesuai dengan yang diinginkan desa pakraman tersebut. Penyuluh berkonsultasi dengan aparat desa sehingga program yang dikerjakan sesuai dengan anggaran desa yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1979. *Dialektologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ananda Kusuma, Sri Reshi. 1986. *Kamus Bahasa Bali*. Denpasar: CV Kayumas Agung.
- Bagus, I Gusti Ngurah ed. 1975. *Masalah Pembakuan Bahasa Bali*. Balai Penelitian Bahasa. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Danandjaya, James. 1994. *Foklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng dan lain-lain*. Jakarta: PT Temrit.
- Djajasudarma, T Fatimah. 1993. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Eresco.
- Depdikbud. 1995. *Tata Bahasa Baku Bahasa Bali*. Denpasar: Depdikbud.
- Dinas Kebudayaan Prov Bali. 2002. *Pedoman Pasang Aksara Bali*. Denpasar: Disbud Tk I Prov Bali.
- Greenberg, J.H.1963 *Intoduction, Universals of language X*. Cambrige: Mass.

- Gautama, Budha Wayan. 2005. *Tata Sukerta Basa Bali*. Gianyar: CV Kayumas Agung.
- Mashun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Teniknya*. Jakarta: PT aja Grafindo Persada
- Muhajir. Noeng H 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kosada Karya.
- Panitia Penyusun Kamus Bali Indonesia. 1978. *Kamus Bali-Indonesia*. Denpasar: Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Samsuri. 1985. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga
- Samarin, William J. 1988. *Ilmu Bahasa Lapangan*. Terjemahan J.S.Badudu. ILDEP: Yogyakarta. Kanisius
- Sudaryanto, 1986. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaga dkk, 1996. *Tata Bahasa Baku Bahasa Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Suryati, Ni Made. 2012. "Variasi Fonologis Dan Leksikal Bahasa Lio Di Flores, Nusa Tenggara Timur: Kajian Dialek Geografi" (Disertasi). Denpasar: Program Doktor; Program Studi Linguistik; Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Suwija. Dkk. 2018. *Kamus Anggah-Ungguh Kruna Bali-Indonesia dan Indonesia-Bali*. Denpasar: Pelawa Sari.
- Verhaar, J.W.M 1984. *Pengantar Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.